

PERAN TNI DALAM KERJASAMA KONTRA-TERORISME TRILATERAL ANTARA INDONESIA-MALAYSIA-FILIPINA TAHUN 2017-2021

Yoyo Wahyono

Program Studi Magister Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRACT

As a diverse region consisting of various cultures, ideologies and beliefs, Southeast Asia provides an adequate climate for the development of extremist groups and movements. The vast territory of both waters and land is one of the reasons for the widespread practice of terrorism which wants to change the basis of countries in Southeast Asia to become more religious. One of the terrorist groups that is closely affiliated with the global terrorism network under the Islamic State of Iraq-Syria (ISIS) is Jema'ah Anshorut Daulah (JAD) which was formed in 2015. A series of terror incidents caused by JAD made efforts to identify how the TNI could be involved in the implementation of trilateral counter-terrorism cooperation with Malaysia and the Philippines, especially in the context of suppressing the movement of terrorist organizations from 2017 to 2021. In carrying out identification and analysis, this study applies a neo-realism approach, the concept of international cooperation, the concept of national security, the concept of terrorism and role theory.

Through research conducted using qualitative methods, this research shows that in every aspect of trilateral counter-terrorism cooperation, the TNI has carried out its duties and roles optimally where these achievements cannot be pro-active by the Indonesian government in encouraging its military in counter-terrorism efforts and the benefits provided by cooperation between the militaries of the three countries.

Keywords: *Trilateral Cooperation, Indonesia National Army, Counter Terrorism, Jema'ah Anshorut Daulah.*

ABSTRAK

Sebagai kawasan yang majemuk yang terdiri atas berbagai kultur, ideologi, serta kepercayaan yang beragam, Asia Tenggara menyediakan iklim yang memadai bagi perkembangan kelompok dan gerakan ekstrimis. Luasnya wilayah baik perairan maupun daratan menjadi salah satu alasan dari maraknya praktik terorisme yang ingin mengubah dasar negara-negara di Asia Tenggara menjadi lebih agamis. Salah satu kelompok teroris yang terafiliasi erat dengan jaringan terorisme global dibawah Islamic State of Iraq-Syria (ISIS) adalah Jema'ah Anshorut Daulah (JAD) yang dibentuk pada tahun 2015. Serangkaian peristiwa teror yang ditimbulkan oleh JAD membuat upaya identifikasi terhadap bagaimana TNI dapat terlibat dalam implementasi kerjasama trilateral kontra-terorisme dengan Malaysia dan Filipina khususnya dalam rangka meredam pergerakan organisasi teroris di tahun 2017 hingga 2021 penting untuk dilakukan. Dalam melakukan identifikasi dan analisis, penelitian ini menerapkan pendekatan neo-realisme, konsep kerjasama internasional, konsep keamanan nasional, konsep terorisme dan teori peran.

Melalui penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kerjasama trilateral kontra terorisme, TNI telah melaksanakan tugas dan peran secara optimal dimana capaian tersebut tidak dapat pro aktifnya pemerintah Indonesia dalam mendorong militernya dalam upaya kontra terorisme serta manfaat yang diberikan oleh kerjasama yang terjalin antara militer ketiga negara.

Kata Kunci: Kerjasama Trilatera, Tentara Nasional Indonesia, Penanggulangan Terorisme, Jemaah Anshorut Daulah.

PENDAHULUAN

Dinamika politik global banyak mengalami perubahan yang dipengaruhi oleh adanya serangan teror 11 September 2001 oleh kelompok Al-Qaeda yang menyasar *World Trade Center* (WTC) milik Amerika Serikat menjadi momentum naiknya isu terorisme ke ranah keamanan di kancah global. Pasca tragedi 9/11, Al-Qaeda menjadi pusat jaringan teroris global yang menggunakan dasar nilai dan ajaran agama Islam dengan istilah "jihad" sebagai pembenaran atas serangan terhadap mereka yang tidak sejalan dengan pandangan ekstremis mereka. Kampanye global '*War on Terror*' memicu negara-negara di Asia Tenggara, seperti Indonesia, Malaysia, dan Filipina, untuk mulai menangani masalah terorisme dengan lebih serius dan memperketat kebijakan pada tingkat nasional terhadap ancaman ini.

Meningkatnya kekhawatiran oleh adanya aktivitas jaringan kelompok teroris Al-Qaeda di wilayah kedaulatan. Seperti Indonesia di teror melalui adanya tragedi Bom Bali I pada Oktober 2002 didalangi oleh Amrozi Bin Nurhasyim yang menewaskan 202 korban jiwa dan 209 korban luka. (Rachmawati, 2021) Tragedi ini diklaim sebagai hasil perbuatan kelompok teroris *Je'maah Islamiyah* (JI) yang terafiliasi dengan Al-Qaeda, serangan ini merupakan bentuk protes akan dukungan Indonesia terhadap gerakan *War on Terror* milik Amerika Serikat juga protes akan keterlibatan Australia dalam aksi pembebasan Timor Timur. Malaysia menghadapi serangan teror dari sekitar 200 orang bersenjata Filipina yang dipimpin oleh pengikut Jamalul Kiram III, yang menyatakan dirinya sebagai Sultan Sulu. Aksi teror juga terjadi di tahun 2016, serangan dari kelompok yang terafiliasi ISIS pengeboman di sebuah klub malam bernama Movidia di kota Puchong, Malaysia. (Quackenbush, 2016) Bagi Filipina sendiri gerakan terorisme telah mengancam mereka sejak awal tahun 2000, lebih dari 40 peristiwa pengeboman yang dilakukan oleh organisasi Islam radikal dan pasukan separatis Islam yang umumnya berasal dari provinsi selatan dari negara tersebut, atau tepatnya dari Mindanao, kepulauan Sulu. (Human Rights Watch, 2007) Daerah perkotaan, pasar dan pertokoan, bandara, kapal feri dan dermaga, serta jalan pedesaan dan jalan raya, semuanya mengalami pengeboman. Mereka tanpa ampun membunuh warga di Filipina, termasuk Kristen, Muslim, pria, wanita, dan anak-anak, meninggalkan yatim piatu, janda, dan duda.

Penyebaran gerakan teror dari kelompok ekstrim di ketiga negara tersebut dibagi ke dalam dua bentuk, yakni lewat jalur dakwah dan jihad dalam rangka mencapai tujuan untuk membangun negara yang menggunakan hukum Islam sebagai landasan nasionalnya. Dari pecahnya pemberontakan kelompok Darul Islam di tahun 1942 hingga kini gerakan-gerakan ini terus berevolusi, salah satunya kelompok *Jema'ah Anshorut Daulah* (JAD) yang dibentuk pada tahun 2015. (Arianti & Taufiqurrohman, 2020) JAD sendiri merupakan jaringan kelompok terorisme lokal di kawasan Asia Tenggara yang berafiliasi dengan kelompok *Islamic State of Iraq-Syria* (ISIS) atau *al-Dawlah al-Islamiyah fii'I-Iraqi wa-sySyaam* (Daesh). Tersingkirnya Al-Qaeda menjadikan ISIS sebagai salah satu poros utama jaringan terorisme global. Di bawah naungan ISIS, JAD sebagai salah satu jaringan teroris yang terbesar di Indonesia tidak hanya terlibat dalam penyelenggaraan aksi-aksi teror melainkan juga turut terlibat dalam serangkaian proses pendanaan, perencanaan, fasilitator, rekrutmen anggota serta memasok persediaan senjata dan material terkait sebagai bentuk dukungan terhadap ISIS. (United Nation, 2019) Pergerakan kelompok terorisme tersebut di Indonesia, Malaysia, dan Filipina seringkali menggunakan agama sebagai landasan tindakan teror dan alat justifikasi aksi-aksi protes, hal ini terlihat dari sasaran teror kelompok JAD yang memiliki pola yang menyoar kelompok yang diidentifikasi sebagai bagian dari *thagut* atau otoritas keamanan, *kafirun* atau orang-orang non-muslim, dan *fasiqun* atau orang muslim yang tidak menjalankan ajaran agama dengan baik (*near enemy*). (Ramadhyas, 2020) Oleh karena itulah, kerjasama yang konkret antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dibutuhkan untuk menanggulangi pergerakan JAD.

Keseriusan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah terorisme adalah dengan pengerahan elemen militer sebagai bagian dari rangkaian strategi untuk melawan kelompok-kelompok teroris ini, hal ini ditandai dengan dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 2018 tentang Tindak Pidana Terorisme khususnya di pasal 43I ayat (1) yang menyatakan 'Tugas Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mengatasi aksi Terorisme merupakan bagian dari operasi militer selain perang.' (KEMENKOPMK, 2018) Keterlibatan militer dalam strategi pemberantasan terorisme ini mendapat kritik dari kelompok masyarakat sipil, di mana masalah terorisme ini merupakan masalah domestic yang perlu ditangani secara penuh oleh Institusi Kepolisian. Terlepas dari berbagai kritik yang muncul terhadap kebijakan kontra-terorisme yang melibatkan pengerahan kekuatan militer untuk

menangani terorisme dan radikalisme lewat Operasi Militer Selain Perang (OMSP), hal ini merupakan tindakan yang konstitusional terlepas dari tidak adanya standar operasional prosedur yang jelas mengenai limitasi dan pembagian tugas antara Polri dan TNI. Sehingga penelitian ini bertujuan mengerucutkan kompleksitas masalah terhadap peran yang dilakukan TNI dalam kerjasama kontra-terorisme Trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina pada periode tahun 2017-2021 khususnya terhadap kelompok teroris JAD sebagai jaringan teroris terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan Realisme klasik sebagai pisau analisis utama. Pemikiran Neo-realisme meyakini bahwa variabel yang paling signifikan dalam urusan internasional adalah kekuatan atau kekuasaan (*Power*). Muncul dari perumusan ulang konsep realis tradisional oleh E.H. Carr, Hans Morgenthau, dan Reinhold Niebuhr, Neo-realisme berpendapat bahwa sistem atau struktur internasional mempromosikan negara untuk memperoleh lebih banyak kekuatan dan adanya peluang melihat untuk negara-negara melakukan kerjasama tergantung tingkat kepentingan akan power suatu negara. Dimana dalam penelitian ini akan berkaitan erat dengan kerjasama kontra terorisme yang dilakukan secara trilateral oleh Indonesia, Malaysia, dan Filipina sebagai bentuk kerjasama yang seringkali dilihat dewasa ini adalah bentuk dari upaya negara untuk menjaga keamanan nasional yang dimiliki.

Dalam kaitannya dengan terorisme sebagai ancaman terhadap keamanan nasional, penelitian ini menggunakan konsep Peran untuk dapat menjelaskan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dengan melihat dan membandingkan bagaimana militer negara lain dikerahkan untuk menangani aksi teror. Penelitian ini akan mengelompokkan peran tersebut ke dalam tema yang lebih luas, yakni Penangkalan, Pencegahan, dan Penindakan yang sejalan dengan poin-poin dalam kerjasama trilateral yang dilakukan oleh ketiga negara.

Serta penggunaan konsep-konsep turunan lainnya, yakni Kerjasama Internasional menurut K.J Holsti yang memandang terjadi karena berbagai macam permasalahan nasional, regional dan global. Kemudian konsep Keamanan Nasional dan Terorisme

untuk memberikan penjelasan secara kritis mengenai fenomena permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang memungkinkan analisis mendalam terhadap fenomena yang sedang terjadi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menggunakan berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik triangulasi untuk memastikan keakuratan hasil.

PEMBAHASAN

Jemaah Anshorut Daulah (JAD) adalah hasil dari meningkatnya masalah radikalisme global yang berasal dari negara-negara Islam berkembang, termasuk ISIS dan Al-Qaeda. Dari radikalisme global dalam bentuk jihadisme, yang dipahami sebagai respon terhadap penindasan politik, ketimpangan ekonomi, dan keadilan sebagai bahan bakar dalam menciptakan gejolak politik ke Indonesia. Kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia dan Filipina menjadi sangat vital karena ancaman kelompok JAD dan kelompok terorisme lainnya yang serupa masih akan tetap ada. Oleh karena itu, segitiga ini bertekad untuk menuntaskannya bersama. (F51, 2019)

Sebenarnya, kecenderungan radikalisasi di Indonesia, Malaysia dan Filipina telah berlangsung lama dan masih berkembang hingga saat ini. Kemunculan radikalisme di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah peristiwa lokal dan dunia. Sejak kemerdekaan bangsa Indonesia, radikalisme dan organisasi radikal tumbuh subur di masyarakat Indonesia. Seperti aksi serangan oleh kelompok pemberontak DI/TII, G-30-s/PKI 1965, dan kelompok Separatis (Aceh dan Papua). (Azca, 2012) Sejalan dengan era reformasi yang telah melahirkan banyaknya gerakan keagamaan termasuk Islam radikal di Indonesia yang mengkonsolidasikan diri untuk diberlakukannya syariah Islam dan sebagai negara Islam (daulah Islamiyah). Seperti kemunculan Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Laskar Jihad (LJ), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Jamaah Islamiyah (JI). Selanjutnya, masalah radikalisasi dan terorisme semakin meluas seiring dengan serangan teroris 11 September 2001 yang dilakukan oleh kelompok militan Islam atau jaringan Al-Qaeda di *World Trade Center* (WTC) di Amerika Serikat (AS), peristiwa

ini memunculkan kesalahpahaman bahwa Islam adalah agama kekerasan. (Abdullah, 2017) Perubahan kebijakan luar negeri AS pasca 9/11 yang fokus pada operasi anti-terorisme global mempengaruhi kebijakan domestik banyak negara, termasuk Indonesia. Kebijakan luar negeri Indonesia dalam perang melawan terorisme bukan hanya sekedar mengikuti langkah AS, tetapi merupakan upaya nyata untuk menghadapi serangan teror dan radikalisme yang berkembang di berbagai kota besar oleh kelompok seperti Jemaah Islamiyah (JI). (Arjanto, 2021)

Dalam perkembangannya, JI sendiri merupakan organisasi terorisme pertama di Indonesia, sementara itu JAD adalah cabang dari JI, dengan pola pergerakan dan penyerangan JAD lebih intens di Indonesia. (Cahyana, 2022) *Jema'ah Anshorut Daulah* (JAD) yang dibentuk pada tahun 2015, dan berdiri sebagai organisasi yang didedikasikan untuk mempromosikan ekstremisme Islam dan juga merupakan cabang dari Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) yang mendukung dan berafiliasi dengan ISIS dan sejumlah kelompok lainnya. Dalam kegiatannya, JAD memperdalam pemahaman agama, melatih umat untuk membangun Khilafah, dan mengajak berperang. JAD menyebarkan ideologi melalui media dan dakwah, serta menerapkan aturan Takfiri, yang menganggap segala sesuatu di luar ajaran Allah sebagai haram dan penganutnya sebagai musuh. (Lubis & Hasibuan, 2019) Kegiatan yang dilakukan oleh JAD dalam segala hal dapat dikenali melalui berbagai jenis bahan dan bom yang dibuat, yaitu seperti Bom panci yang berisi gunting, mur, tinner pembersih kuku dan juga peledak *Triacetone Triperoxide* (TATP) yang memang umum digunakan oleh ISIS.

Aksi-aksi kejahatan JAD yang secara beruntutan terjadi, dimulai dari Peristiwa MH. Thamrin Jakarta Pusat pada 14 Januari 2016 yang mengakibatkan tujuh korban jiwa (termasuk pelaku bom bunuh diri), serta beberapa luka-luka. Pada November 2016, bom molotov meledak di Gereja Oikumene, Samarinda, oleh teroris JAD yang juga terlibat dalam bom bunuh diri di Mapolres Surakarta pada April 2016. Pada 8 Maret 2017, JAD melakukan aksi teror lain di Bandung, dimana ditemukan bukti rencana serangan di lokasi lain dan hubungan dengan ISIS. Aksi teror lainnya terjadi di Surabaya dan Sidoarjo pada tahun 2018, sebagai balas dendam atas penahanan pimpinan JAD, Aman Abdurrahman. Serangan di Mapolda Riau pada Mei 2018, menggunakan senjata tajam. Pada Maret 2021, bom meledak di Gereja Katedral Makassar, melukai 20 orang. Semua insiden terkait JAD dan ISIS. Rangkaian kejadian tersebutlah yang kemudian membuat TNI sebagai bagian

dari alat pertahanan negara Indonesia yang memiliki tugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Indonesia, mengingat JAD merupakan ancaman terhadap keamanan dan stabilitas negara bahkan kawasan yang menuntut TNI untuk dapat pro aktif dalam menjalankan kerjasama internasional yang dilakukan Indonesia yang salah satunya diwujudkan melalui kerjasama Trilateral dengan Malaysia dan Filipina.

A. Kerjasama Kontra Terorisme Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina

Indonesia, Malaysia, dan Filipina meningkatkan kerjasama trilateral untuk menghadapi ancaman terorisme, dimulai dengan patroli maritim trilateral di Tarakan, Indonesia, pada Juni 2017. Inisiatif ini, yang dipimpin oleh Indonesia, bertujuan mengatasi perampokan bersenjata dan terorisme maritim di sekitar Laut Sulu. Patroli ini melibatkan pertukaran informasi intelijen antara ketiga negara untuk mencegah aksi terorisme. Setelah sukses dengan patroli maritim, ketiga negara meluncurkan patroli udara bersama di Subang, Malaysia, pada Oktober 2017, serta mendirikan pusat koordinasi militer di Tarakan, Indonesia; Tawau, Malaysia; dan Bongao, Filipina. Patroli udara ini melengkapi patroli maritim dan ditujukan untuk melawan kelompok teroris di Filipina Selatan. Kerjasama trilateral ini dianggap sebagai upaya kolektif untuk menghadapi ekstremisme dan terorisme di kawasan, terutama setelah pertempuran di Kota Marawi, Filipina. Situasi di Marawi pada 2017, yang melibatkan kelompok Maute dan ISIS, memicu darurat militer dan menarik perhatian regional. Kerjasama ini juga dimaksudkan untuk mencegah perluasan pengaruh kelompok-kelompok seperti ISIS dan JAD. Latihan darat trilateral dilakukan pada Agustus 2019 di Pulau Tarakan, Kalimantan Utara, yang melibatkan latihan teknik tempur.

Kondisi inilah yang kemudian membuat ketiga negara yang berbagi wilayah tri-perbatasan seluas satu juta kilometer persegi tersebut, terus mengintensifkan kerja sama pertahanan guna membendung kejahatan transnasional terorganisir dan ancaman teroris. (Muhaimin, 2017)

B. Peran TNI dalam Penangkalan Aksi Terorisme Melalui Kerjasama Kontra Terorisme Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina

Terorisme adalah ancaman serius terhadap kedaulatan negara, bukan hanya pelanggaran hukum. Keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme di Indonesia

sangat penting, terutama menghadapi kelompok seperti *Jamaah Ansharut Daulah* (JAD) yang berafiliasi dengan ISIS dan ingin mengganti konstitusi negara dengan ideologi Khilafah. TNI bekerja sama dengan BNPT dan Polri dalam operasi militer dan patroli perbatasan, serta menjalin kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina. Meskipun ada kritik terhadap penggunaan militer, pendekatan ini dianggap perlu untuk melindungi keamanan nasional. TNI juga memiliki unit khusus anti-teror seperti Komando Operasi Khusus (Koopsus), yang dibentuk untuk menangani operasi khusus dalam melawan terorisme, dengan dukungan penuh dari pemerintah. Lebih lanjut, pendirian Koopsus ini diatur secara spesifik pada pasal 46B yang menyatakan:

'Komando Operasi Khusus Tentara Nasional Indonesia disebut Koopsus TNI bertugas menyelenggarakan operasi khusus dan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan operasi khusus yang membutuhkan kecepatan dan keberhasilan tinggi guna menyelamatkan kepentingan nasional di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mendukung tugas pokok TNI.'

Dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai pembentukan unit Koopsus sebagai peraturan penunjang pelibatan militer dalam aspek terorisme menjadi legitimasi untuk adanya intervensi militer lebih jauh dalam masalah ini terlepas dari adanya penolakan yang bersumber dari kelompok masyarakat sipil, bagi Robert Kaplan hal ini dijelaskan sebagai *'They typically dismiss any moral aspirations as either doomed to fail or cynical attempts to cover up political motive.'* Bagi Realisme Klasik, negara akan tunduk pada segala bentuk norma dan moralitas yang ada hanya jika norma dan moralitas tersebut sejalan dengan kepentingan nasionalnya, artinya bagi negara, moralitas hanyalah bagian dari alat justifikasi yang digunakan untuk mencapai kepentingan

Bisa dikatakan bahwa berkaitan dengan penangkalan terorisme di Indonesia, TNI memiliki peran dalam mengembangkan kesiapsiagaan dan respons darurat untuk menghadapi serangan terorisme. Pelatihan yang diberikan terhadap personil juga memang diarahkan terhadap respons situasi darurat dengan cepat dan efektif. Meskipun tantangan masih ada, seperti keterbatasan dalam mengungkap jaringan terorisme secara menyeluruh, kerjasama internasional dan peningkatan kapasitas intelijen diharapkan dapat memperkuat upaya kontra-terorisme di Indonesia.

C. Peran TNI dalam Pencegahan Aksi Teror JAD

Dalam menanggapi kritik pro dan kontra perihal wewenang serta batasan tanggung jawab TNI dalam mengentaskan aksi terorisme. Di Indonesia landasan hukum yang telah dibuat yakni TAP MPR VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan peran Polri, pasal 2 hanya menyebutkan bahwa TNI diberi wewenang sebagai 'alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki tugas pokok dalam menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.'

Meskipun Indonesia telah melakukan kerja sama trilateral kontra-terorisme dengan Malaysia dan Filipina, hingga kini belum ada aturan yang jelas mengenai peran TNI dalam kebijakan kontra-terorisme. Untuk memahami peran militer yang ideal dalam penanganan terorisme, kita dapat melihat implementasi di negara lain, seperti Amerika Serikat. Menurut *United States Pacific Command* (USPACOM), peran militer dan kepolisian dipisahkan dengan jelas dalam menangani terorisme. Militer lebih fokus pada upaya preventif seperti identifikasi ancaman, penyebaran informasi, dan perencanaan strategi, sementara polisi lebih berfokus pada penegakan hukum dan pengumpulan bukti. Dalam konteks Indonesia, militer berperan penting dalam pencegahan aksi teror, termasuk melalui strategi "*hardening target*" untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan. TNI juga memaksimalkan operasi intelijen untuk mendeteksi pergerakan terorisme di tahap awal. Kerja sama trilateral dengan Malaysia dan Filipina membantu membangun jalur komunikasi (*Hotline Communication*) yang bertujuan untuk merespons situasi kritis dengan cepat, meski implementasinya masih perlu ditingkatkan.

Contoh kasus serangan terhadap Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM, Wiranto, pada 2019 oleh simpatisan JAD menunjukkan pentingnya evaluasi dan penyesuaian SOP pengamanan oleh TNI. Dalam hal pembalasan (*retaliation*), TNI berperan dalam mengidentifikasi pola serangan teroris dan melakukan operasi intelijen untuk meminimalisir dampak serangan. Melalui simulasi rutin dan latihan penanggulangan teror, TNI terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai ancaman, dari serangan konvensional hingga senjata pemusnah massal. Latihan-latihan ini menunjukkan kapabilitas TNI dalam merespons berbagai skenario terorisme yang mungkin terjadi di Indonesia.

D. Peran TNI dalam Penindakan Aksi Teror JAD

Jamaah Ansharut Daulah (JAD) bukan hanya kelompok teroris, tetapi juga memenuhi syarat sebagai kelompok bersenjata non-negara. Mereka menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan mereka, tidak terintegrasi ke dalam institusi negara seperti militer atau polisi, dan memiliki otonomi dalam hal politik dan operasi militer. Namun, JAD tidak memiliki struktur kepemimpinan yang jelas dan lebih sering beroperasi dalam unit-unit kecil yang berbasis keluarga, memungkinkan individu mengorganisir serangan teror secara independen.

Aksi teror JAD bertujuan untuk mendestabilisasi pemerintahan Indonesia, yang meskipun mendapat dukungan dari Malaysia dan Filipina, terus menjadi target serangan JAD. Dalam menghadapi ancaman ini, Indonesia mengadopsi pendekatan militeristik sebagai bagian dari strategi kontra-terorisme yang melibatkan TNI. Pengerahan TNI dalam operasi-operasi anti-teror bersama menjadi tepat seiring dengan kapabilitas TNI dalam melakukan pertempuran jarak dekat, mengadakan perang gerilya dengan mobilitas yang tinggi, serta ketahanan personil dalam melakukan pertempuran-pertempuran jangka panjang. Aksi kolaborasi antara TNI dan Kepolisian ini berhasil melemahkan kekuatan MIT di wilayah Sulawesi, seiring dengan keberhasilan TNI dalam mengeksekusi pimpinan MIT Santoso di tahun 2016 diikuti dengan pimpinan MIT berikutnya, Ali Kalora pada 2020. Keberhasilan TNI dalam menangani kasus-kasus teror yang menjadi bagian dari gerakan insurgensi dalam cakupan kerjasama trilateral yang dilakukan memperlihatkan bagaimana kemampuan militer dalam berkontribusi secara efektif untuk menumpas serangan teror di Indonesia serta menjawab kritik mengenai perluasan peran TNI dalam kebijakan kontra-terorisme.

Kerjasama trilateral dengan Malaysia dan Filipina juga diintensifkan untuk menghadapi ancaman terorisme di kawasan, terutama dalam menghadapi kelompok-kelompok yang memiliki hubungan dengan ISIS. Partisipasi militer Indonesia dalam upaya kontra-terorisme ini menunjukkan efektivitas dalam menumpas terorisme di dalam negeri dan mengatasi potensi ancaman dari luar. Meskipun ada kendala birokrasi, kerjasama trilateral telah menghasilkan operasi yang berhasil dan menekan aktivitas teroris, termasuk latihan bersama dan pertukaran intelijen untuk mencegah radikalisasi lebih lanjut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya jalinan kerjasama Indonesia dengan Malaysia dan Filipina dalam melawan aksi teror merupakan langkah yang diambil ketiga negara sebagai upaya untuk melindungi diri dari ancaman terorisme yang terus berkembang. Kerjasama trilateral ini menunjukkan bahwa baik Indonesia, Malaysia, maupun Filipina bahwa permasalahan terorisme merupakan ancaman yang kompleks dan membutuhkan penanganan terkoordinir. Walaupun Neo-Realisme menekankan mekanisme self-help di mana negara harus mampu menjamin keamanan nasionalnya sendiri dalam rangka menjamin keberlangsungan negaranya dengan tidak menggantungkan keamanannya pada aktor maupun institusi lain, namun kerjasama yang dilakukan oleh ketiga negara menunjukkan bahwa negara adalah aktor yang rasional yang dalam konteks ini dipahami sebagai mampu memperhitungkan keuntungan yang mungkin didapat lewat adanya kerjasama dengan negara lain.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa dalam setiap aspek kerjasama kontra terorisme, TNI telah melaksanakan tugas secara optimal dimana capaian tersebut tidak dapat dilepaskan dari pro aktifnya pemerintah Indonesia dalam memberikan regulasi dukungan seperti Perpres mengenai pembentukan unit Koopsus sebagai peraturan penunjang pelibatan militer dalam aspek terorisme. Kemudian dalam aspek pencegahan aksi teror, TNI sebagai salah satu pilar nasional pemberantasan terorisme melakukan sejumlah kegiatan untuk meningkatkan kemampuan, termasuk memerankan skenario pertempuran dengan organisasi teroris. Selain itu, pencegahan aksi teror juga dilakukan melalui institusi militer memiliki strategy 'hardening target' atau pembendungan, dimana upaya untuk mengamankan dan melindungi kelompok masyarakat yang rawan menjadi target sasaran teror dimulai dengan melakukan pendeteksian sedini melalui gelaran operasi intelijen.

Terakhir terkait dengan aspek penindakan aksi teror yang ditimbulkan oleh JAD, kerjasama trilateral yang dilakukan telah mendukung TNI dalam melakukan upaya untuk menekan berkembangnya aksi-aksi tersebut melalui operasi keamanan baik yang dilakukan di dalam maupun luar wilayah territorial Republik Indonesia. Pelibatan TNI oleh Pemerintah Indonesia untuk melibatkan militer dalam upaya pemberantasan terorisme dengan dikeluarkannya UU Tindak Pidana Terorisme juga menjadi salah satu

aspek yang memperkuat peran TNI dalam menyikapi kerjasama yang dilakukan. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa pertanyaan penelitian telah dapat dijawab melalui serangkaian aktivitas tersebut, sehingga jawaban konkrit dari pertanyaan tersebut adalah TNI memainkan peran vital dalam kerjasama kontra-terorisme Trilateral antara Indonesia-Malaysia-Filipina pada periode tahun 2017-2021.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Lubis, S. A., & Hasibuan, P. (2019). *Pertarungan Faham Takfiri di Indonesia: Menerobos Kemapanan Tradisi Sunni*. Medan: Perdana Publishing.

United Nation. (2019). *Jamaah Ansharut Daulah*. Washington: UN Security Council.

Jurnal

Abdullah, S. (2017). Islam bukan Agama Kekerasan. *Journal Ilmiah Pendidikan Anak*, 3.

Arianti, V., & Taufiqurrohman, M. (2020). *The Quiet Threat of Indonesia's Jamaah Ansharul Khilafah*. Jakarta: The Diplomat.

Azca, N. (2012). *Pengamat UGM: Gerakan Radikal Islam Jaman ORBA adalah Aksi Identitas*. Yogyakarta: UGM. Retrieved from <https://ugm.ac.id/id/berita/4748-pengamat-ugm-gerakan-radikal-islam-jaman-orba-adalah-aksi-identitas/>

Ramadhyas, A. R. (2020). Menelaah Aksi Penargetan dan Pola Strategi Penyerangan Terorisme. *Journal of Terrorism Studies*, 21.

Internet

Arjanto, D. (2021). *Kronologi Awal Organisasi Jamaah Islamiyah*. Jakarta: Tempo.co. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1530164/kronologi-awal-organisasi-jamaah-islamiyah>

Cahyana, B. (2022). *Mengenal Perbedaan JAD & JI, Organisasi Teroris yang Melatih Kader di Gunung Sempu Bantul & Kaliurang Sleman*. Yogyakarta: Harian Jogja. Retrieved from <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/02/16/510/1095428/mengenal-perbedaan-jad-ji-organisasi-teroris-yang-melatih-kader-di-gunung-sempu-bantul-kaliurang-sleman>

F51. (2019). *Di Balik TNI Gabung Indomalphi*. Jakarta: Pinter Politik. Retrieved from <https://www.pinterpolitik.com/in-depth/di-balik-tni-gabung-indomalphi/>

- Human Rights Watch. (2007). *Lives Destroyed: Attacks on Civilians in the Philippines*. Manila: HRW.org.
- KEMENKOPMK. (2018). *UU No 5 Tahun 2018*. Jakarta: Kementerian Koordinator Pertahanan, Maritim, dan Keamanan RI. Retrieved from <https://jdih.kemenkopmk.go.id/sites/default/files/2019-08/UU%20Nomor%205%20Tahun%202018.pdf>
- Muhaimin. (2017, June 12). Sepak Terjang Militan Indonesia di Marawi Memikat Loyalis ISIS. Jakarta, Jawa Barat, Indonesia. Retrieved from <https://international.sindonews.com/berita/1212797/40/sepak-terjang-militan-indonesia-di-marawi-memikat-loyalis-isis>
- Quackenbush, C. (2016). *The Grenade Attack on a Malaysian Nightclub 'Had ISIS Links*. Malaysia: Time.
- Rachmawati. (2021, 10 12). Kilas Balik Bom Bali 2002, 19 Tahun Silam Ledakan Dahsyat Guncang Kuta dan Denpasar. Jakarta, Jawa Barat, Indonesia.